

**RETORIKA MODERASI BERAGAMA DI KAWASAN
PERBATASAN: PENELUSURAN, PRAKTEK, ATAU SEBATAS
RETORIKA DI ACEH TENGGARA**

**The Rhetoric of Religious Moderation in Border Areas: Exploration,
Practice, or Mere Rhetoric in Southeast Aceh**

Maria Hanifah

STIT Babussalam Aceh Tenggara
maria.hanifah05@gmail.com

Article Info:

Submitted: Nov 27, 2024	Revised: Dec 11, 2024	Accepted: Dec 23, 2024	Published: Dec 28, 2024
----------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------------

Abstract

Rhetoric of Religious Moderation is the art of speaking in implementing a moderate society. Religious moderation illustrates that moderation is not only carried out by Muslims but is carried out by all religions. The aim of this research is to determine the form/practice of religious moderation and its implications within the Ministry of Religion. The research method used is a mixed-method type, concurrent embedded. The analysis used is Miles and Huberman's as well as Quantitative Percentage analysis. The research samples used were the Southeast Aceh Ministry of Religion, KUA, Religious Counselors, FKUB, and the Community. The forms/practices of moderation that are already underway within the Ministry of Religion of Aceh Tenggara include a society that has a national commitment, a society that is non-violent, a society that accepts religious traditions, and a society that is tolerant. Religious moderation which is running in the "Good" category, namely 88%, is already running. The implications of the practice of religious moderation within the

Ministry of Religion of Southeast Aceh are more about the task of protecting the community to implement Religious Moderation or making a moderate society still encounter several difficulties, namely 1) Religious Moderation outside Southeast Aceh among Non-Muslims must be emphasized, 2) The identity of the Catholic religion on the KTP is clarified, 3) Emphasis on religious sharia/teachings for border students is increased, 4) Provision of adequate educational facilities in border areas, 5) Increased justice for all citizens in practicing religion and receiving religious education, 6) Programming of religious instructors who maximum and effective.

Keywords: Rhetoric; Moderation; Religious; Areas; Border

Abstrak: Retorika Moderasi Beragama yaitu suatu seni berbicara dalam melaksanakan masyarakat yang moderat. Moderasi beragama memberikan gambaran bahwa moderasi tidak hanya dilakukan oleh kalangan umat Islam namun dilakukan seluruh agama. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk/praktek moderasi beragama dan implikasinya di lingkungan Kementerian Agama. Metode Penelitian yang digunakan yaitu *Mix-metode* bertipe *concurrent embedded*. Analisis yang digunakan yaitu milik Miles dan Huberman serta analisis Kuantitatif Persentase. Sample penelitian yang digunakan yaitu pada Kemenag Aceh Tenggara, KUA, Penyuluh Agama, FKUB, dan Masyarakat. Bentuk/praktek moderasi yang sudah berjalan di Lingkungan Kementerian Agama Aceh Tenggara yaitu masyarakat memiliki komitmen kebangsaan, masyarakat yang anti kekerasan, masyarakat yang menerima tradisi keagamaan, dan masyarakat yang toleransi. Moderasi beragama yang berjalan sengan kategori “Baik” yaitu sebesar 88% sudah berjalan. Implikasi dari praktek moderasi beragama yang ada di lingkungan kementerian Agama Aceh Tenggara lebih pada tugas dalam mengayomi masyarakat untuk melaksanakan Moderasi Beragama atau menjadikan masyarakat yang moderat masih menemui beberapa kesulitan, yaitu 1) Moderasi Beragama diluar Aceh Tenggara dikalangan Non-Muslim harus ditekankan, 2) Identitas agama Katolik dalam KTP diperjelas, 3) Penekanan syariat/ajaran Agama pada Siswa Perbatasan ditingkatkan, 4) Penyediaan fasilitas pendidikan memadai di daerah perbatasan, 5) Peningkatan keadilan bagi seluruh warga dalam menjalankan Agama dan mendapatkan pendidikan Agama, 6) Pemrograman Penyuluh Agama yang maksimal dan efektif.

Kata Kunci: Retorika; Moderasi; Beragama; Kawasan; Perbatasan

PENDAHULUAN

Penelitian ini akan menggali mendalam tentang “Retorika Moderasi Beragama di Kawasan Perbatasan: Penelusuran, Praktek, atau Sebatas Retorika di Lingkungan Kementerian Agama Aceh Tenggara”. *Pertama*, Aceh merupakan provinsi yang diberi julukan dengan Serambi Mekkah. Namun, daerah Aceh Tenggara adalah daerah yang memiliki penduduk dengan keberagamaan yang sangat beragam. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk non-muslim yang sudah berjumlah 37,75% menganut kristen Protestan dan kristen Katolik 4,03% dari keseluruhan penduduk di Aceh Tenggara. Sedangkan umat Islam sendiri saat ini hanya berjumlah 58,22% dari keseluruhan penduduk. **“Profil Kabupaten**

Aceh Tenggara,” 2019. Hal tersebut memberikan dampak bahwa Aceh Tenggara sebagai kawasan perbatasan. Kawasan perbatasan yang dimaksud yaitu kawasan yang berbatasan antara komunitas muslim dan non-muslim yang hidup secara bersama.

Kedua, konflik dalam umat yang rukun bisa terjadi dikarenakan tersebarnya *boax*. Salah satu *boax* tersebut yaitu pendirian patung Yesus tanpa perizinan dari pemerintah Kabupaten. Menurut Bulkainisah dalam berita kba.one mengatakan “Mendirikan patung itu sama dengan mencoreng marwah syariat Islam di wilayah Aceh, khususnya di Aceh Tenggara,” kata Diki, koordinator aksi tersebut, Selasa, 2 Januari 2018. “Mendirikan patung di Aceh Tenggara dapat merusak kerukunan umat beragama yang selama ini telah terbina.” Masyarakat Kutambaru yang berbatasan dengan kampung Nangka juga menilai tindakan tersebut dapat merusak kearifan lokal. Sebab patung tersebut tidak memiliki manfaat bagi keberagaman etnis di Aceh Tenggara, baik secara filosofis maupun historis.(Bulkainisah, 2021) Setelah terjadi perundingan dan pelurusan hoax yang beredar di masyarakat konflik tersebut sudah mereda.

Hasil Observasi menyebutkan kebiasaan adat budaya lokal masyarakat non-muslim Aceh Tenggara yaitu, mempunyai kebiasaan minum-minum tuak/miras dan judi dimana merupakan suatu adat istiadat dalam acara pesta seperti pernikahan dan acara menjaga orang yang sudah meninggal. Inilah yang menjadi kekhawatiran pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara terhadap masyarakat yang ada di kawasan perbatasan yang bisa mempengaruhi jiwa dan agamanya khususnya islam yang mana memiliki kebudayaan yang bertentangan/kotra dengan budaya non-muslim.

Kegiatan budaya lokal masyarakat Aceh Tenggara dalam observasi di Kampung Nangka telah terkikis dari proses globalisasi yaitu budaya barat saat hari raya Natal dan tahun baru Masehi, kebiasaan masyarakat non-muslim merayakan dengan miras/alkohol. Beberapa remaja di kawasan perbatasan tergiur untuk ikut rombongan non-muslim untuk merayakannya dengan meminum-minuman yang digolongkan haram di dalam Islam itu. Hal tersebut memberikan konflik antara orang tua sebagai masyarakat dan lingkungan yang pada akhirnya menimbulkan kerusuhan dan kerusakan.

Moderasi beragama merupakan sebuah jalan tengah di tengah keberagaman agama di Aceh Tenggara. Moderasi merupakan budaya Nusantara yang berjalan seiring, dan tidak saling menegasikan antara agama dan kearifan lokal (*local wisdom*). Tidak saling mempertentangkan namun mencari penyelesaian dengan toleran.(Akhmadi, 2019)

Melalui moderasi beragama dapat memecahkan permasalahan perkembangan teknologi yang mengakibatkan kemunculan fenomena negatif yaitu permasalahan disinformasi. Disinformasi merupakan dampak pendistribusian *fake news* yang beredar secara online di dunia maya. (Pratiwi & Asyarotin, 2019) Hal tersebut sejalan dengan program dari Kementerian Agama terhadap Aceh Tenggara dimana program Kemenag sudah meluncurkan dua kampung moderasi beragama di Aceh Tenggara yaitu kampung Kuthe Tanoh Megakhe dan Kute Lawe Hakhum (Kemenag, 2023). Dua kampung tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Aceh Tenggara sebagai masyarakat yang memiliki moderasi beragama dalam jiwa mereka.

Namun daripada itu, dalam pelaksanaan moderasi beragama terdapat retorika moderasi beragama yang memiliki arti negatif. Retorika dianggap sebagai kemampuan menggunakan bahasa yang indah yang dapat mempesona orang lain, tetapi tidak mempunyai isi. Retorika dipandang sebagai pemakaian bahasa yang bombastis yang hanya merupakan omong kosong belaka. Retorika dianggap sebagai penggunaan bahasa belaka yang jauh dari realitas, sehingga muncul ungkapan “Ini realitas atau hanya retorika belaka?” dan tidak bisa dipercaya.

Retorika moderasi beragama berujung pada perkataan saja tanpa adanya praktek yang nyata serta dipromosikan untuk mencapai keharmonisan dan kenyamanan masyarakat. Retorika moderasi beragama ini menjadi bahan perbincangan diantara pegawai Kementerian Agama, yang seharusnya tidak ada rasa ketidakpercayaan dengan istilah moderasi beragama. Retorika moderasi beragama ini juga menimbulkan pro-kontra dilingkungan Kementerian Agama di beberapa penganut tertentu, hanya saja masih ditutup-tutupi untuk tidak diketahui secara luas.

Maka dari itu, perlu dilakukan penelusuran, praktek, dan upaya yang harus dilakukan untuk mendalami permasalahan moderasi agama yang ada. Penelusuran dilakukan dengan metode penelitian yang kredibel tentang moderasi beragama yang sudah diterapkan di lingkungan Kementerian Agama di Aceh Tenggara. Praktek Moderasi beragama ditunjukkan dengan sikap cara pandang, dan praktik yang dilakukan menghadapi keragaman yang ada. Dalam hal ini, pegawai dalam naungan Kementerian Agama menjadi sorotan utama untuk menjadi objek penelitian. Hal ini dikarenakan ditemukannya permasalahan moderasi beragama di lingkungan Kementerian Agama di Aceh Tenggara yang memiliki keragaman yang tinggi. Menjadi pertengahan antara perbedaan keyakinan menjadikan masyarakat

bimbang dalam pelaksanaannya. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip moderasi beragama. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti perlu melakukan penelitian secara mendalam tentang “*Retorika Moderasi Beragama di Kawasan Perbatasan: Penelusuran, Praktek, atau Sebatas Retorika di Lingkungan Kementerian Agama Aceh Tenggara*”. Maka dari itu tujuan penelitian yang bisa diangkat yaitu 1) Untuk mengetahui dan mengidentifikasi jenis-jenis bentuk/ praktek moderasi beragama yang sudah diterapkan di Lingkungan Kementerian Agama di Aceh Tenggara, 2) Untuk mengetahui dan mengidentifikasi implikasi dari praktek moderasi beragama yang sudah diterapkan di Lingkungan Kementerian Agama di Aceh Tenggara.

Manfaat umum penelitian ini memberikan hasil pengamatan tentang retorika moderasi beragama yang sudah dilaksanakan dan berupa rekomendasi, sehingga diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, sebagai berikut.

1. Bagi masyarakat, diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk meningkatkan toleransi beragama sebagai bentuk pelaksanaan moderasi beragama di Aceh Tenggara.
2. Bagi STIT-Babussalam Aceh Tenggara, diharapkan hasil penelitian dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penerapan moderasi Beragama di lingkungan Kampus dan menjadi acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang bisa dilakukan di STIT-Babussalam.
3. Bagi pengambil kebijakan, hasil penelitian ini dijadikan pertimbangan untuk mengatasi polemik moderasi beragama yang beredar di masyarakat, sehingga menghasilkan persiapan yang lebih baik.
4. Bagi Kementerian Agama, hasil penelitian ini menjadi evaluasi pelaksanaan Moderasi Beragama yang sudah dijalankan. Selain itu juga dapat digunakan untuk menyusun kegiatan Moderasi beragama yang diperlukan oleh masyarakat.

Bagi para peneliti, diharapkan penelitian ini sebagai kajian konseptual yang menjawab permasalahan Moderasi Beragama di Kawasan Perbatasan, sehingga dapat digunakan sebagai acuan pembuatan penelitian lanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *mix-metode*. *Mix-metode* adalah metode yang menggabungkan dua metode yaitu kuantitatif dan kualitatif. Metode *Mix-metode* yang digunakan yaitu bertipe *concurrent embedded*. *Concurrent embedded* yaitu metode campuran

penguatan dimana metode kuantitatif memperkuat metode kualitatif (Junaid, 2016) (Ilham Junaid, 2016). Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan menggunakan instrumen wawancara terstruktur (Sirajuddin Saleh, 2017). Narasumber yang digunakan yaitu.

1. Pegawai KUA (Kantor Urusan Agama) Babul Makmur dan Kecamatan Babel
2. Penyuluh Agama di Kawasan Perbatasan
3. FKUB (Forum Keberagamaan Umat Beragama)
4. Pegawai Bimas Kementerian Agama
5. Masyarakat Perbatasan Desa Lawe Sumur, desa Panosan, Desa Kutambaru, dan Desa Kutambaru Bencawan.

Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan pada bulan September hingga November 2024. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui metode wawancara, angket, dokumentasi, dan observasi langsung. Teknik analisis yang digunakan menggunakan teknik *Miles Huberman* dan Analisis Persentase.

1. Teknik Wawancara Terstruktur dan Tidak Terstruktur

Wawancara terstruktur, adalah wawancara yang dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. (Sugiyono, 2014)

Teknik wawancara dilakukan secara mendalam dan langsung. Penelitian ini dilakukan secara intensif pada narasumber yang ditentukan. Penelitian ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail. (Sugiyono, Cara Mudah Menyusun Skripsi, Penelitian Kapasitas, Dan Disertasi (Bandung: Alfabeta, 2015).

2. Teknik angket

Lembar angket/kuesioner yaitu untuk memperoleh informasi dari responden dengan memberikan pertanyaan tertulis yang digunakan. Lembar angket dengan aturan skala likert menggunakan nilai 3, 2, dan 1. Angket yang digunakan berbentuk *check list*.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. (Tanzeh, 2011) Dokumen yang hendak diperoleh

adalah kegiatan-kegiatan yang mendorong moderasi beragama di lingkungan kementerian agama

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk/Praktek Moderasi Beragama

Bentuk/praktek moderasi yang sudah berjalan di Lingkunga Kementerian Agama Aceh Tenggara yaitu masyarakat memiliki komitmen kebangsaan, masyarakat yang anti kekerasan, masyarakat yang menerima tradisi keagamaan, dan masyarakat yang toleransi. Bentuk dan Praktek Moderasi yang sudah berjalan di Aceh Tenggara disajikan dalam analisis Kuantitatif dan Kualitatif. Analisis Kuantitatif disajikan dalam bentuk Tabel 1 dan Gambar 1.

Bentuk moderasi yang ada ditunjukkan dari nilai angket rata-rata moderasi yang sudah berjalan di Aceh Tenggara yaitu sebesar 88% yang memiliki arti sudah berjalan dengan “Baik”. Sedangkan nilai yang terendah diperoleh pada Indikator Komitmen Kebangsaan yaitu 79 % dengan ketegori “Cukup Baik”.

Tabel 1. Persentase Analisis Angket Moderasi Beragama

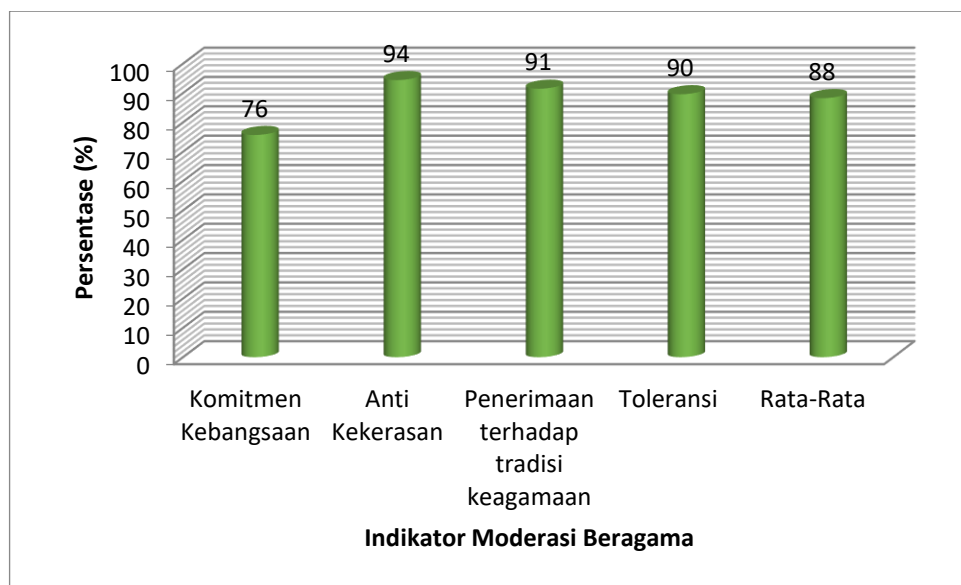
Indikator Moderasi Beragama	Persentase
Komitmen Kebangsaan	79
Anti Kekerasan	94
Penerimaan terhadap tradisi keagamaan	90
Toleransi	91
Rata-Rata	88

Menurut Pihak FKUB Perwakilan tokoh Masyarakat, Moderasi Beragama di Aceh Tenggara secara keseluruhan sudah Baik, hanya ada satu kampung yang kurang dalam bermoderasi Beragama, dimana masyarakat sering terlibat masalah kerukunan antar umat beragama. Namun, Moderasi Beragama di Aceh Tenggara untuk umat muslim dan non muslim baik kristen dan katolik secara keseluruhan sudah rukun. Masyarakat sudah hidup berdampingan sejak lama (Dedi Aspianto FKUB Tokoh Masyarakat, Hasil wawancara, 15 Oktober 2024).

Hal ini didukung dengan dinominasikan dua desa Moderasi yang di SK-kan Kemenag Kanwil Aceh yaitu Lawe Harum Kecamatan Deleng Porkison dan Tanoh Meggare

Kecamatan Badar. Penempatan desa Moderasi beragama dikarenakan masyarakatnya rukun selama 10 Tahun. Tidak ada pertengkarannya yang menyebabkan FKUB datang. Terdapat juga Desa Percontohan yang diberikan oleh Kanwil yaitu Perapat Titi Panjang Kecamatan Lawe Bulan (Dedi Aspianto FKUB Tokoh Masyarakat, Hasil wawancara, 15 Oktober 2024).

Hal tersebut dikuatkan oleh Anggota Bimas Kemenag yang mana Desa Moderasi hampir 90% sudah hidup rukun tanpa ada pertengkarannya antar warga. Pemilihan kampung moderasi ini memiliki dua agama dalam setiap kampungnya. Desa Tanoh Megare lebih banyak masyarakat beragama Islamnya, sedangkan di Lawe Harum lebih banyak masyarakat non-muslim. Dalam kampung Moderasi ini itu lebih ketat/dilarang pemeliharaan seperti Babi dan Anjing lebih sedikit berkeliaran jadi masyarakat saling menjaga dalam kerukunan. Kerukunan juga dibuktikan dengan di desa Tanoh Megare memiliki kesepakatan untuk proses pemilihan Kepala Desa yaitu jika Pengulu non muslim maka sekretaris muslim begitu juga sebaliknya (Pahrudin Anggota Bimas Kemenag, Hasil Wawancara, 25 Oktober 2024).



Gambar 1. Grafik Persentase Tiap Indikator Moderasi Beragama

Pada Gambar 1. tersebut juga terlihat jelas bahwa masyarakat secara keseluruhan sudah “Baik” dalam menjalankan Moderasi beragama. Hanya masih terdapat Pekerjaan Rumah yang sedikit belum terselesaikan di daerah perbatasan Aceh Tenggara. Hanya pada komitmen kebangsaan yang masih perlu ditingkatkan di Aceh Tenggara.

Keaktifan umat dalam kehidupan bermasyarakat dan pembangunan peradaban dunia peneliti amati dari keaktifan pegawai kementerian agama dalam mengemban jabatan. Sebagian besar pegawai Kemenag ingin mengemban Jabatan dan meningkatkan karir yang ada. Namun pada temuan yang peneliti lakukan dalam pegawai Kementerian Agama ditemukan hanya 7

pegawai Non-Muslim didalam seluruh pegawai yang ada yang berjumlah 80 pegawai. Kementerian Agama lebih condong untuk urusan agama Islam. Agama non-muslim belum terorganisir secara baik.

Dalam pelaksanaan anti kekerasan secara keseluruhan pegawai kementerian agama sudah Baik dalam menghadapi anti kekerasan. Permasalahan yang timbul hanya pada pengaturan masyarakat yang masih perlu perhatian dimana menjadi program utama dari Kemeterian Agama yaitu Moderat dalam beragama. Moderat seringkali disalah artikan dalam kehidupan sosial beragama di Indonesia yang menganggap bahwa orang yang moderat tidak memiliki keteguhan dalam pendirian, tidak serius, bahkan tidak menjalankan ajaran agama dengan sungguh-sungguh (Syatar et al., 2020). Para pelaku radikalisme atau ekstremis tersebut mendoktrin para pengikutnya dengan pemahaman yang berlawanan dengan sikap pemerintah terhadap keberagaman umat beragama atau stereotip terhadap Moderasi Beragama (Muhammad, 2022).

Aceh Tenggara menjadi daerah yang rukun bermoderasi antar umat beragama, hanya sebagian yang masih berlaku tidak rukun seperti kerukunan dalam bertetangga. Permasalahan yang muncul sedikit dari kerukunan bertetangga bukan beralaskan agama. Permasalahanyang muncul akan dijabarkan dalam setiap indikator dari penelitian.

Komitmen kebangsaan adalah Indikator Moderasi Beragama yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Bentuk-bentuk praktek dari Komitmen kebangsaan yang dapat ditemukan di Aceh Tenggara yaitu 1) Memiliki sifat bermoral, 2) Adil tidak cenderung ke salah satu pilihan, dan 3) Keaktifan umat dalam kehidupan bermasyarakat dan pembangunan peradaban dunia. Kmitmen kebangsaan dalam lingkungan Kementerian Agama sudah berjalan dengan Baik, temuan lain ditemukan pada masyarakat Aceh Tenggara yang kurang dalam melaksanakan Komitmen Kebangsaan dengan baik dan benar

Penerimaan terhadap tradisi keagamaan adalah Indikator Moderasi Beragama yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Bentuk-bentuk praktek dari Penerimaan terhadap tradisi keagamaan yang dapat ditemukan di Aceh Tenggara yaitu 1) Terbuka atas segala perkembangan pengetahuan, 2) Memiliki keteladanan sikap, dan 3) Bersikap pertengahan dalam beragama, 4) Penerimaan terhadap tradisi keagamaan secara keseluruhan berjalan dengan Baik.

Anti Kekerasan adalah Indikator Moderasi Beragama yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Bentuk-bentuk praktek dari Anti kekerasan yang dapat ditemukan di Aceh Tenggara yaitu 1) Ramah dalam bersikap baik muslim dan non-muslim, 2) Akrab

dengan semua kalangan baik muslim dan non muslim, 3) Damai dalam menghadapi konflik agama dan non-agama, 4) Santun dalam bertutur kata, dan 5) Menghindari sesuatu yang berlebihan dalam beragama dan bermasyarakat. Hanya indikator menghindari sesuatu berlebihan dalam bertetangga masih sulit dilakukan. Pertengkaran antar tetangga masih terjadi dan pada akhirnya akan diarahkan keranah agama jika yang melakukan masyarakat muslim dan non-muslim. Saat terjadi konflik maka pada akhirnya masyarakat akan kesulitan dalam menentukan tutur kata yang baik karena diliputi oleh emosi. Namun secara keseluruhan sudah berjalan anti kekerasan dalam masyarakat Aceh Tenggara.

Toleransi adalah Indikator Moderasi Beragama yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Bentuk-bentuk praktek dari Toleransi yang dapat ditemukan di Aceh Tenggara yaitu 1) Memadukan antara ilmu dan tindakan, 2) Tidak mudah terprovokasi atas pemahaman yang sempit atas agama, 3) Pandangan hidup yang mencerminkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, dan 4) Rukun dalam beragama. Toleransi sudah diterapkan dalam Pegawai di Kementerian Agama lingkungan kerja dan masyarakat. Semua pegawai sudah memahami pentingnya moderasi beragama untuk menyatukan masyarakat yang majemuk. Permasalahan timbul hanya dikalangan masyarakat yang majemuk.

Kurangnya toleransi di Aceh Tenggara muncul pada pertengkaran kecil pada hari-harian pada tahun 2017 yaitu pertengkaran pemuda Islam dan Nasrani masalah ungkapan kotor (perkataan tidak baik) dari seorang Muallaf dengan pemuda Nasrani. Pemuda Nasrani menganiaya dengan memukul pemuda Muallaf. Kemudian di larikan ke Rumah Sakit. Setelah ditelusuri permasalahan yang terjadi adalah permasalahan keluarga. Namun karena dilakukan oleh pemuda Muallaf dan Non muslim menyebabkan kesalah pahaman digiring kedalam pertengkaran Agama.

Selain itu juga di Desa Babul Makmur dimana 70% Nasrani dan 30% Muslim dimana tetangga Nasrani memotong pohon dan membuang limbah kayu kebelakang rumahnya, dimana dibelakang rumah non muslim ada rumah orang Muslim. Ketika Muslim menebang kayu, limbahnya menutupi kadang ternak babi non muslim, kemudian orang Non Muslim tersebut marah. Hal tersebut timbul juga karena benuansa Agama. Kemudian dimediasi oleh Kepala Desa dan FKUB. Selain itu menurut FKUB dari perwakilan tokoh Agama mengatakan kegiatan pengislaman/pengkristenan (kristenisasi) tidak dilakukan oleh masyarakat asli Aceh Tenggara. Hanya saja pernah adanya kejadian masuknya di Aceh Tenggara penyebar buku di Perusahaan dan toko-toko seperti Indomaret yang berbuat secara masip dan cepat. Meyebarkan paham berkedok berjudul Pancasila yang berisi tentang

ajaran-ajaran Yesus dan doa-doa Non muslim di jalan-jalan. Penyebaran Agama itu dilakukan oleh orang luar dengan menyebarkan seperti buku/modul dari Lawe Pakam tembus ke Gayo Lues sampai Pan Selatan daerah Melaboh.

Moderasi beragama memiliki peran penting di dalam mengelola kemajemukan bangsa yang beragama dan multikultural. Mengakomodir perbedaan melalui sikap dan ekspresi keagamaan nilai toleransi dan persamaan dijunjung tinggi dalam moderasi beragama (Wahid et al., 2021). Moderasi bergama yang sudah berjalan di Aceh Tenggara sudah Baik hanay beberapa masalah dalam kerukunan hidup bermasyarakat. Dikarenakan kemajemukan yang ada menyebabkan permasalahan sehari-hari menjadikan permasalahan agama jika berhadapan dengan berbeda Agama. Permasalahan moderasi juga berakar dari ketidakpahaman masyarakat dalam mengetahui aturan yang menjadi syariat Islam di aceh Tenggara. Moderasi beragama juga memberikan kemampuan masyarakat yang baik dalam komitmen kebangsaan menyatukan bangsa dengan salah satunya pemilu. Komitmen kebangsaan bagian pemilu belum mengakar kemasayarakat bahwa untuk melaksanakan demokrasi harus memilih sesuai ahti nurani dan visi misi yang diusung calon pemimpin.

Moderasi beragama dapat diklasifikasikan menjadi: 1) Moderat dalam beribadah; 2) pembentukan syariat yang moderat; 3) moderat dalam aqidah; dan 4). Memiliki budi pekerti dan perangai yang moderat (Abu Yasid, 2017). Kalsifikasi tersebut memberikan gambaran kepada penulis bahwa moderasi di klasifikasikan ke dalam moderasi sosial terhadap masyarakat dan moderasi terhadap diri sendiri. Moderasi dalam definisi tersebut berjalan di Aceh Tenggara dilingkungan kementerian Agama. Pegawai Kementerian agama lebih condong kepada pegawai yang taat pada syariat Agama

2. Implikasi Bentuk/Praktek Moderasi Beragama

Implikasi dari praktek moderasi beragama yang ada di lingkungan kementerian Agama Aceh Tenggara lebih pada tugas dalam mengayomi masyarakat untuk melaksanakan Moderasi Beragama atau menjadikan masyarakat yang moderat. Dalam mengemban tugas memoderatkan masyarakat masih menemui beberapa kesulitan.

Permasalahan yang peneliti temukan pertama yaitu di Kecamatan Lauser di Kampung Pak-Pak. Kampung Pak-Pak adalah kampung ujung Aceh Tenggara yang berbatasan dengan Tanah Karo Sumatera Utara yang mayoritas Non-Muslim (Baik Kristen/Katolik). Pada saat kita menuruni Kampung Pak-Pak yang di atas perbukitan turun perbukitan dan akan menemukan daerah di Tanah Karo. Di dalam Kampung Pak-Pak terdapat satu Masjid yang bisa digunakan oleh msyarakat setempat. Masyarakat setempat berkehidupan rukun antar

tetangga tidak terdapat pertengkaran dan perselisihan antar warga. Hanya saja kampung Pak-Pak adalah daerah yang tidak memiliki sarana sekolah yang memadai. Pada saat anak memasuki jenjang SMP maka anak-anak akan melanjutkan sekolah di Tanah Karo Sumatera Utara. Pada kenyataannya, Kepala Sekolah di tanah Karo tersebut tidak mengizinkan anak-anak yang sekolah di sekolah mereka menggunakan jibab sebagai bagian Islam, diharuskan anak Aceh Tenggara yang beragama muslim tidak berjibab. Pada akhirnya anak-anak diperbatasan mengeluhkan keadaan tersebut (Maria, Observasi: 5 Oktober 2024). Berdasarkan pernyataan dari beberapa pemuka Agama setempat yang mengetahui permasalahan tersebut menyatakan bahwa solusi yang diberikan oleh pemerintah Aceh Tenggara yaitu memberikan fasilitas sekolah berupa pondok pesantren gratis untuk anak-anak di Kampung Pak-Pak yang ingin melanjutkan pendidikan SMPnya, sehingga anak-anak tersebut tidak hilang akidah Islam sesuai dengan syariat Islam di Aceh.

Pada kenyataannya menjadi temuan tersendiri dimana agama non-Muslim dilingkungan Muslim Aceh Tenggara akan merasakan moderasi beragama atau kehidupan moderat, namun hal tersebut tidak dialami untuk masyarakat yang muslim yang minoritas di daerah lain. Masyarakat moderat adalah masyarakat yang pertengahan. Pertengahan yang dicontohkan di Aceh Tenggara yaitu pada Desa Moderasi Beragama yaitu di desa Tanoh Megare yang mayoritas muslim namun da warga Non-Muslimnya memiliki kesepakatan untuk proses pemilihan Kepala Desa yaitu jika Pengulu Non-muslim maka sekretaris muslim begitu juga sebaliknya (Pahrin Anggota Bimas Kemenag, Hasil Wawancara, 25 Oktober 2024). Hal tersebut menunjukkan bahwa menjadi pertengahan dalam bermasyarakat dan beragama bukan hal yang sulit dilakukan.

Namun pada kenyataannya yang lain, kurangnya toleransi terjadi di sekolah yang dominan non-muslim diadakan MISA di sekolah. Sedangkan anak muslim yang sekolah ditempat tersebut tidak diadakan kegiatan pendukung seperti Maulid untuk mengingat dan memperdalam pengetahuan tentang Nabi Muhammad SAW, walaupun sudah dilaksanakan kegiatan praktek sholat berjamaah untuk siswa muslim. Hal tersebut bisa dilakukan dengan menekankan guru Agama Islam mampu mengajak siswa muslim diperbatasan untuk belajar agama lebih mendalam ditempat lain seperti berkunjung kepesantren mengaji di masjid kegiatan agama Islam yang lebih mendalam untuk menekankan syariat Islam.

Moderasi beragama yang baik juga ditunjukkan pada tidak adanya pertengkaran mazhab di Aceh Tenggara. Masyarakat imam syafii dan maliki hidup berdampingan. Hal tersebut ditunjukkan pada saat sholat tarawih dibulan Ramadhon, dimana dalam satu masjid

terdapat dua imam. Imam pertama menjalankan sholat 11 rekaat untuk semua makmum. Kemudian imam dan makmum yang melaksanakan 11 rekaat menyelesaikan sholat dan doa bersama, kemudian menuju rumah masing-masing dan dilanjutkan imam kedua yang akan melaksanakan 22 rekaat sholat dengan makmum yang akan melaksanakan sholat 22 rekaat.

Permasalahan Mahzab dalam agama Islam tidak terlihat dalam kementerian Agama yang ada di Aceh Tenggara secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Organisasi Muhamadiyah masih merasa aman dalam aturan serambi Mekkah. Organisasi Muhamadiyah tidak masuk/ terlibat dalam pencalonan menjadi imam masjid At-Taqwa. Hampir seluruh jajaran Kementerian Agama lebih didominasi mahzab Syafii atau Islam tradisional. Tidak ada diskriminasi organisasi. Islam serambi mekkah menjadi benteng Islam di Aceh.

Permasalahan lain muncul dari warga Katolik. Warga Katolik tidak memiliki identitas agama yang jelas di Indonesia. Dimana KTP yang mereka miliki hanya tertulis beragama Kristen. Hal tersebut menyebabkan kerisauan masyarakat Katolik tersendiri. Hal tersebut terlihat dari penyuluh Agama yang sudah PPPK yaitu Penyuluh Agama Kristen dan Penyuluh Islam. Penyuluh Katolik belum PPPK karena belum diakui agama Katolik.

Pelayanan KUA hanya diperuntukkan untuk warga muslim, sedangkan warga non muslim dilakukan hanya melalui DUCAPIL. Menjadi cerita tersendiri kedepannya Kementerian Agama akan memprogramkan KUA untuk semua Agama. KUA di Aceh Tenggara selalu bertempat didekat warga yang banyak muslim walaupun dalam satu desa paling banyak non muslimnya.

Penyuluh Agama yang bertugas untuk masyarakat taat beribadah namun pada kenyataannya tidak berjalan secara maksimal. Masih terdapat permasalahan masyarakat terhadap Moderasi Beragama yang berhubungan dengan pemahaman akidah masyarakat dalam bermasyarakat yang baik. Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa implikasi yang didapat dari penelitian ini yaitu 1) Kurangnya Moderasi Beragama diluar Aceh Tenggara dikalangan Non-Muslim harus ditekankan, 2) Identitas agama Katolik dalam KTP diperjelas, 3) Penekanan syariat/ajaran Agama pada Siswa Perbatasan ditingkatkan, 4) Penyediaan fasilitas pendidikan memadai di daerah perbatasan, 5) Peningkatan keadilan bagi seluruh warga dalam menjalankan Agama dan mendapatkan pendidikan Agama, 6) Pemrograman Penyuluh Agama yang maksimal dan efektif.

Retorika Moderasi Bergama yang ada di Aceh Tenggara lebih kepada bentuk positif dari definisi retorika. Retorika dalam arti modern dapat diartikan sebagai tindakan dalam membina kerjasama, saling pengertian, dan keadaan damai di dunia melalui kegiatan berbicara.

Dengan demikian, kesalahpahaman dan berbagai bentuk miskonsepsi yang diakibatkan kegiatan berbicara dapat dikurangi bahkan dihilangkan sama sekali (Sulistyarini & Zainal, 2020):

Dalam menjalankan moderasi beragama di Aceh Tenggara dilingkungan Kementerian Agama secara keseluruhan mampu memahami apa itu moderasi beragama yang diharapkan oleh kementerian Agama. Hanya beberapa orang yang masih condong bahwa moderasi beragama hanya berurusan pada Agama saja. Permasalahan kerukunan yang disebabkan oleh Agama.

Moderasi Beragama adalah moderasi yang harus dimiliki oleh semua agama. Setiap umat manusia harus menjadi yang moderat berarti umat yang toleransi, yang berkebangsaan, umat yang memahami tradisi keagamaan, dan umat yang anti kekerasan.

Posisi moderasi beragama disini bertindak sebagai pemahaman keagamaan yang seimbang tetap konsisten berada pada posisi tengah-tengah yang tidak memiliki keberpihakan pada ideologi keagamaan kanan yang mengarah pada radikalisme maupun keberpihakan kepada ideologi kiri yang mengarah pada liberalisme. Moderasi Beragama adalah budaya dan perilaku bangsa Indonesia yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Sumarto, 2021).

Moderasi beragama tersebut memberikan kita gambaran luas bahwa moderasi tidak hanya dilakukan oleh kalangan umat Islam namun dilakukan seluruh agama. Moderasi beragama bukan suatu moderasi agama. Seluruh bangsa Indonesia harus saling rukun (anti kekerasan), saling toleransi, saling peri kebangsaan, dan saling mengerti keragaman yang ada.

Moderasi Beragama memiliki pandangan positif untuk orang muda Kristen (OMK) dan Remaja Masjid (RISMA) di NTT. (Nusa & Theedens, 2022) Moderasi beragama dikawasan yang memiliki multikultural dan berbagai macam agama dalam satu lingkup akan membentuk sikap moderasi yang tinggi. Hal tersebut juga terjadi di Aceh Tenggara. Moderasi beragama yang sudah berjalan sudah baik. Hanya beberapa kegaitan kerukunan antar bertetangga ang masih perlu ditingkatkan. Namun pada kenyataannya moderasi beragama untuk yang mayoritas non muslim dan hampir seluruh penduduk non Muslim menyebabkan umat muslim harus mengikuti adat budaya mereka sebagai rasa toleransi. Pada kenyatannya Toleransi bukanlah kita bersikat keluar Syarita Islam. Syariat Islam ang di maksud yaitu dilarang menggunakan Jilbab warga desa Pak-Apak Aceh Tenggara yang bersekolah di dataran tinggi Karo Sumatera utara. Toleransi pada dasarnya hanya menekankan saling

pengertian disetiap kegiatan agama yang dijalankan orang lain. Bukan berarti harus mengikuti kegiatan agama dan budaya agama lain, hanya sebatas menghormati.

Moderasi beragama yang tepat harus menghargai hak individu untuk memeluk agama atau keyakinan mereka sendiri, serta menghargai hak orang lain untuk memeluk agama atau keyakinan yang berbeda. Moderasi yang efektif juga harus memperhatikan prinsip-prinsip inklusivitas dan nondiskriminasi, serta memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang merasa dikecualikan atau tidak dihargai karena agama atau keyakinan mereka (Prayitno & Wathoni, 2022). Untuk memahami moderasi agama diperlukan suatu pemahaman dalam memahami moderasi secara objektif dan komprehensif terkait berbagai permasalahan yang ada. Permasalahan utamanya dapat dilihat dalam cara pandang terhadap isu-isu pluralitas agama. Diperlukan ketepatan menalar teks-teks keagamaan sehingga menghasilkan penafsiran sangat dibutuhkan. Agar melahirkan konsep beragama yang moderat, tidak ekstrim dan radikal (Islam, 2020).

Retorika adalah seni berbicara (Puspitasari, 2023) atau gaya bahasa yang di pergunakan, lisan maupun tertulis (Sulistyarini & Zainal, 2020). Retorika juga disebut sebagai adu argumen (Safitri, 2018). Kecakapan berretorika dan berpikir kritis diperoleh melalui pelatihan secara konsisten untuk meningkatkan kualitas kemampuan berbicara dan berpikir tingkat tinggi. Namun pada kenyataannya moderasi beragama yaitu menjadi insan yang moderat. Insan yang mampu hidup dalam pertengahan disetiap sisi kehidupan, baik dalam keluarga, masyarakat yang majemuk dan masyarakat yang tidak majemuk. Retorika yang diinginkan oleh Kementerian Agama yaitu meyakinkan kepada masyarakat akan pentingnya moderasi beragama melalui lisan yang menyakinkan. Retorika itu sendiri adalah sebuah kemahiran dan kepandaian dalam menggunakan bahasa untuk menciptakan sebuah pikiran dan perasaan (Uyun, 2023). Tujuan retorika tersebut pada akhirnya untuk menyampaikan ide, pikiran, dan perasaan kepada orang lain agar mereka mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh rhetor (Zaini, 2017).

Retorika di sini diharapkan menjadi sesuatu yang positif dalam bermoderasi beragama. Dalam mencapai Moderasi beragama yang mendalam langkah yang bisa dicapai di era Digitalisasi saat ini yaitu pemahaman paradigma inklusivitas keragaman, kroscek konten hoax, pemahaman etika komunikasi universal, melakukan kampanye konten-konten moderasi beragama, Milenial sebagai duta moderat. Konsep ini akan menjadi tahap pembentukan kehidupan yang damai dan harmonis di lingkungan multikultural dan multireligius (Mandala et al., 2024). Konflik berbasis kekerasan di Indonesia seringkali

berakhir menjadi bencana kemanusiaan yang cenderung berkembang dan meluas baik dari jenis maupun pelakunya. Maka hal tersebut dapat diatasi melalui program dari Moderasi beragama. (Manap, 2022)

KESIMPULAN

Bentuk/praktek moderasi yang sudah berjalan di Lingkungan Kementerian Agama Aceh Tenggara yaitu masyarakat memiliki komitmen kebangsaan, masyarakat yang anti kekerasan, masyarakat yang menerima tradisi keagamaan, dan masyarakat yang toleransi. Moderasi beragama yang berjalan sengan kategori “Baik” yaitu sebesar 88% sudah berjalan. Bentuk-bentuk praktek secara rinci ditemukan di Aceh Tenggara yaitu 1) Memiliki sifat bermoral, 2) Adil tidak cenderung ke salah satu pilihan, dan 3) Keaktifan umat dalam kehidupan bermasyarakat dan pembangunan peradaban dunia, 5) Ramah dalam bersikap baik muslim dan non-muslim, 6) Akrab dengan semua kalangan baik muslim dan non muslim, 7) Damai dalam menghadapi konflik agama dan non-agama, 8) Santun dalam bertutur kata, 9) Menghindari sesuatu yang berlebihan dalam beragama dan bermasyarakat, 10) Terbuka atas segala perkembangan pengetahuan, 11) Memiliki keteladanan sikap, dan 12) Bersikap pertengahan dalam beragama. Penerimaan terhadap tradisi keagamaan secara keseluruhan berjalan dengan Baik, 13) Memadukan antara ilmu dan tindakan, 14) Tidak mudah terprovokasi atas pemahaman yang sempit atas agama, 15) Pandangan hidup yang mencerminkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, dan 16) Rukun dalam beragama.

Implikasi dari praktek moderasi beragama yang ada di lingkungan kementerian Agama Aceh Tenggara lebih pada tugas dalam mengayomi masyarakat untuk melaksanakan Moderasi Beragama atau menjadikan masyarakat yang moderat masih menemui beberapa kesulitan, yaitu 1) Moderasi Beragama diluar Aceh Tenggara dikalangan Non-Muslim harus ditekankan, 2) Identitas agama Katolik dalam KTP diperjelas, 3) Penekanan syariat/ajaran Agama pada Siswa Perbatasan ditingkatkan, 4) Penyediaan fasilitas pendidikan memadai di daerah perbatasan, 5) Peningkatan keadilan bagi seluruh warga dalam menjalankan Agama dan mendapatkan pendidikan Agama, 6) Pemrograman Penyuluh Agama yang maksimal dan efektif.

Saran yang bisa diberikan oleh peneliti yaitu bekaitan pendalaman issue lebih spesifik. Penelitian selanjutnya bisa memperdalam pada peran dari penyuluh Agama dan peningkatan

keefektifan kinerja Penyuluh Agama. Peneliti selanjutnya juga dapat meneliti moderasi beragama di daerah Tanah Karo. Bagi pemerintah dapat lebih memberikan keadilan mendapatkan pendidikan dan pembelajaran Agama sesuai amanat UUD 1945 untuk menciptakan masyarakat yang berkarakter kuat. Diharapkan Pemerintah juga memberikan dana khusus untuk daerah perbatasan yang memiliki akses pendidikan yang kurang baik sekolah dan fasilitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yasid. (2017). *Membangun Islam Tengah*. Pustaka Pesantren.
- Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation In Indonesia's Diversity. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 45–55. [https://kualibali.id/storage/app/media/uploaded-fiels/82-Article Text-150-1-10-20190531.pdf](https://kualibali.id/storage/app/media/uploaded-fiels/82-Article%20Text-150-1-10-20190531.pdf)
- Bulkainisah. (2021). *Masyarakat Aceh Tenggara Tolak Berdirinya Patung Keluarga di Makam*. Kba.One. <https://www.kba.one/news/masyarakat-aceh-tenggara-tolak-berdirinya-patung-keluarga-di-makam/index>.
- Islam, K. N. (2020). Moderasi Beragama di Tengah Pluralitas Bangsa: Tinjauan Revolusi Mental Perspektif Al-Qur'an. *KURIOSITAS Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 13(1), 38–59. <http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/kuriositas/article/view/1379/710>
- Junaid, I. (2016). Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian Pariwisata. *Jurnal Keparinwisataan*, 10(01), 59–74. <https://doi.org/10.31219/osf.io/npvqu>
- Kemenag. (2023). *Kemenag Aceh Luncurkan dua Kampung Moderasi di Aceh Tenggara*. <http://aceh.kemenag.go.id/index.php/baca/kemenag-aceh-luncurkan-2-kampung-moderasi-di-aceh-tenggara>
- Manap, A. (2022). Moderasi Beragama Keragaman Indonesia Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (Religious Moderation Of Indonesian Diversity In The Framework Of The Unitary State Of The Republic Of Indonesia). *Widya Genitri : Jurnal Ilmiah Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan Hindu*, 13(3), 229–242. <https://doi.org/10.36417/widyagenitri.v13i3.503>
- Mandala, I., Witro, D., & Juraidi. (2024). Transformasi Moderasi Beragama Berbasis Digital 2024 : Sebagai Bentuk Upaya Memfilter Konten Radikalisme dan Ekstremisme di Era Disrupsi. *Bimas Islam*, 17(1), 127–160. <https://doi.org/http://doi.org/10.37302/jbi.v17i1.1242>
- Muhammad, I. (2022). Fenomenologis Moderasi Beragama pada Madrasah di Aceh. *MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 12(4), 980–995. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jm.v12i4.17289>
- Nusa, S., & Theedens, Y. M. (2022). Membangun Sikap Moderasi Beragama yang Berorientasi pada Anti Kekerasan Melalui Dialog. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(3), 4208–4220. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i3.2789>
- Pratiwi, A., & Asyarotin, A. N. K. (2019). Implementasi Literasi Budaya dan Kewargaan

- Sebagai Solusi Disinformasi pada Generasi Millennial di Indonesia. *Kajian Informasi & Perpustakaan*, 7(1), 65–80. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24198/jkip.v7i1.20066>
- Prayitno, M. A., & Wathoni, K. (2022). Internalisasi Nilai Moderasi Beragama dalam Proses Pendidikan Di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendas Mahakam*, 7(2), 124–130. <https://doi.org/https://doi.org/10.24903/pm.v7i2.1125>
- Profil Kabupaten Aceh Tenggara*. (2019). https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_15091794334_BAB_-IV_DOK.pdf
- Puspitasari, N. (2023). Peningkatan Kapasitas Mahasiswa Melalui Pelatihan Public Speaking. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 2(2), 89–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.54099/jpma.v2i2.622>
- Safitri, D. (2018). Kontestasi Retorika Islam Nusantara di Media Baru. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 11(2017), 235–256. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v12i.194>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Alfabeta.
- Sulistiyarini, D., & Zainal, A. G. (2020). *Buku Ajar Retorika*. CV. AA. RIZKY.
- Sumarto. (2021). Implementasi Program Moderasi Beragama Kementerian Agama RI. *Jurnal Pendidikan Guru*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.47783/jurpendigu.v3i1.294>
- Syatar, A., Amiruddin, M. M., Haq, I., & Rahman, A. (2020). Darurat Moderasi Beragama di Tengah Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19). *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 13(1), 1–13. <http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/kuriositas/article/view/1376>
- Tanzeh, A. (2011). *Metodologi Penelitian Praktis*. Teras.
- Uyun, U. (2023). Retorika Dakwah Husain Basyaiban Dalam Pemanfaatan Media Sosial Tiktok. *Al-Ittishol: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 4(2), 125–143. <https://doi.org/https://doi.org/10.51339/ittishol.v4i2.993>
- Wahid, M., Muhtarom, A., & Raya, F. (2021). *Menanam Kembali Moderasi Beragama untuk Merajut Kebhinekaan Bangsa*. Teras Karya.
- Zaini, A. (2017). Retorika Dakwah Mamah Dedeh dalam Acara “Mamah & Aa Beraksi” di Indosiar. *Lmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 11(2), 219–234. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v12i.1900>